

BAB I

PENDULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Collaborative governance merupakan kerjasama antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik. Tata kelola kolaboratif mendorong upaya bersama dari pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah untuk bekerjasama dalam mengatasi masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan bersama. (Aiyub: 2020).

Collaborative governance sebagai paradigma baru yang digunakan menghadapi isu yang beragam dalam masyarakat yang kompleks, paradigma yang di maksud prinsip dasarnya adanya kesetaraan hubungan diantara pemangku kepentingan di sektor publik, swasta dan masyarakat. Hal ini juga sebuah proses yang melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk kepentingan atau mencapai sebuah tujuan.

Pemerintah yang bekerjasama dengan masyarakat telah mengeluarkan sejumlah paket wisata untuk mendukung perkembangan kegiatan pariwisata pariwisata itu sendiri. Kegiatan tersebut meliputi promosi, destinasi wisata, fasilitas umum maupun fasilitas penunjang, produk wisata dan sumber daya manusia. Berkat adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, saat ini sudah terdapat berbagai objek wisata yang telah dikenal hingga keluar negeri dan objek wisata yang dalam proses promosi yang tentunya memiliki potensi dan daya tarik masing-masing. Pariwisata daerah mampu memberikan kontribusi guna untuk perkembangan dalam kemajuan sektor pariwisata di daerah, kondisi yang

dilihat bahwa jumlah kunjungan yang menginap di hotel berkelas dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan yang drastis. Hingga pemberian otonomi kepada badan promosi pariwisata daerah mencapai dengan sesuai harapan dan mampu mengembangkan atau memajukan pariwisata ntuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan menyatakan bahwa kegiatan pariwisata didukung dengan pengelolaannya oleh masyarakat, pengusaha atau pihak swasta, pemerintah dan pemerintah daerah. Sumatera Barat dari segi geografisnya sangat potensial untuk dijadikan dan dikembangkan menjadi objek wisata alam maupun budaya, hal ini tentu di dukung oleh alamnya yang bervariasi. Keindahan lainnya yang bisa ditemui adalah lembah-lembah, gunung-gunung yang tertinggi, air terjun, danau, goa, serta fenomena alam lainnya yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Pokdarwis adalah kelompok sadar wisata yang bekerja sama dengan dinas pariwisata untuk meningkatkan pengelolaan pantai sasak pohon seribu, yang dikeluarkan melalui keputusan kepala dinas pariwisata, kabupaten Pasaman Barat, Nomor: 556/037/Dispar/2021 tentang pembentukan kelompok sadar wisata pantai pondok indah pohon seribu jorong pondok nagari persiapan ranah pasisie kecamatan sasak ranah pasisie, Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021.

Undang-undang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintah harus serta melibatkan masyarakat dan masyarakat

dalam pembangunan daerah yang terbagi dalam beberapa kegiatan. Kemunculan konsep kerjasama adalah hasil perkembangan dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini telah berlangsung. Kerjasama merupakan tindakan yang dianggap tepat ketika dibutuhkan komunikasi dan peran antar aktor yang saling berhubungan dan membuat keuntungan.

Proses pengelolaan destinasi pariwisata tidak hanya dititik beratkan kepada peran pemerintah, namun juga di berbagai sektor yang ada dalam hal ini peran masyarakat yang ikut dalam pengelolaan destinasi wisata, yang paling berperan dalam pengelolaan destinasi pariwisata di pantai sasak pohon seribu yaitu pokdarwis (kelompok sadar wisata) namun pihak swasta tidak ikut serta dalam pengelolaan pariwisata, Sinergi peran stakeholders tersebut divisualisasikan dengan menggunakan perspektif *collaborative governance*.

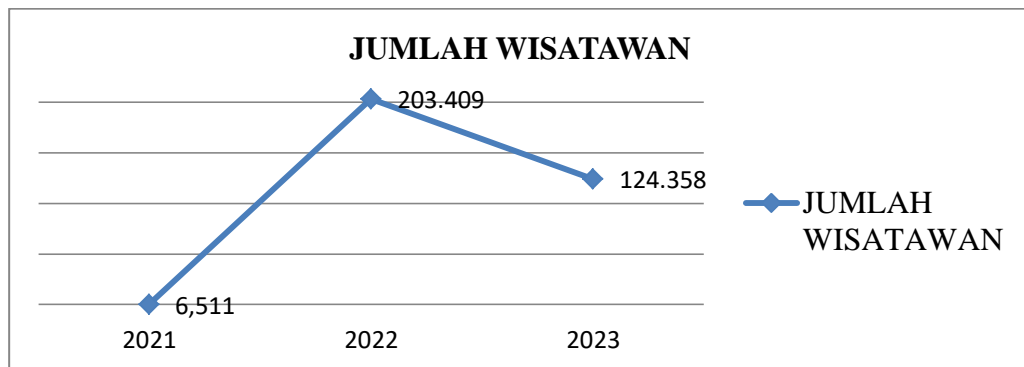
Berdasarkan keputusan kepala dinas pariwisata telah ditetapkan pembentukan kelompok sadar wisata yang dimana ada 3 seksi yaitu: (1) Seksi keamanan dan ketertiban, yang dikepalai oleh Suardi Delli (2) Seksi kebersihan dan keindahan yang dikepalai oleh Edi Efendi, (3) Seksi daya tarik wisata dan kenangan yang dikepalai oleh Jhonis Muis.

Pokdarwis sudah diberikan tugas kelompok sadar wisata yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata yaitu: (1) Sebagai motivator, penggerak dan komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat sekitar destinasi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik dengan menetapkan dan membudidayakan sapta pesona. (2) Sebagai mitra pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan sadar wisata daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dalam bidang kepariwisataan Kabupaten Pasaman Barat.

Salah satu pantai yang ada di pasaman barat yaitu pantai Sasak Pohon Seribu yang dimana letak Pantai Sasak yang tidak terlalu jauh dari Ibu Kota Kabupaten Simpang Ampek Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat, Lokasi objek wisata ini kurang lebih 40 kilometer dari Simpang Ampek. Maka pengelolaan kepariwisataan difokuskan ke lokasi tersebut.

Gambar 1.1
Grafik Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Pasaman Barat 2023



Sumber: Dinas Pariwisata Pasaman Barat Th 2023

Jika dilihat dari gambar grafik diatas jumlah kunjungan mengalami peningkatan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 203,409 wisatawan, jumlah kunjungan terendah pada tahun 2021 dengan jumlah 6.511. Lalu pada tahun 2023 jumlah kunjungan tetap mengalami penurunan yaitu dengan jumlah sebesar 124,358 wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Dengan melihat jumlah kunjungan wisatawan pantai sasak pohon seribu Pasaman Barat yang belum maksimal, maka dari itu pemerintah daerah dan kelompok sadar wista (Pokdarwis),serta masyarakat sekitar pantai sasak pohon seribu melakukan kerja sama melalui Dinas Pariwisata untuk terus melakukan pengembangan pada pantai sasak pohon seribu dengan melakukan beberapa program seperti, pembangunan, dan perbaikan infrastruktur terutama akses jalan,

dan pembangunan fasilitas pendukung di pantai sasak Pasaman Barat. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengembangan pantai sasak pohon seribu yang nantinya akan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekitar pantai sasak pohon seribu dan juga akan meningkatkan PAD Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/462/BUP. PASBAR/2022. Tentang Bupati Pasaman Barat yang berisi penetapan destinasi wisata Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Aktifitas dimulai dari perencanaan menunjukkan bahwa sektor pariwisata masih kurangnya dalam pengelolaan pariwisata kabupaten Pasaman Barat, kurangnya kerja sama antara Pemda sama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta Masyarakat Nagari Ranah Pasisie, Pengelolaan kegiatan pariwisata yang dilihat dari segi inovasi atau daya tarik wisata di pantai sasak pohon seribu tersebut, bahwasanya peneliti melihat dilapangan tidak adanya kesesuaian atau berjalannya pengelolaan dari segi pengelolaan inovasi.

Sedangkan dibagian seksi keamanan dan ketertiban berjalan dengan baik dan dibagian seksi kebersihan dan keindahan juga berjalan dikarenakan pantai sasak terkenal dengan kebersihan pantainya, jadi peneliti memfokuskan melihat dari segi inovasi pantai yang dimana belum terkelola dengan baik, Peranan masyarakat dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam bidang pariwisata sangat penting karena peranan masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh atau mendapatkan informasi mengenai kebutuhan, kondisi dan sikap masyarakat. Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang

dalam Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Namun berdasarkan mini riset ditemukan bahwasannya bentuk nyata proses *collaborative governance* dalam pengelolaan wisata Pantai Sasak Pohon Seribu Pasaman Barat sampai saat ini belum berjalan dengan baik, hal itu dapat dilihat dari Saling Ketergantungan, Penyatuan Pemikiran Secara Konstruktif Untuk Mencapai Solusi, Keputusan Bersama Semua Aktor (Joint Ownership Of Decisions) dalam proses kolaborasi. Semua *collaborative governance* dibangun berdasarkan adanya Saling Ketergantungan yang dilakukan melalui rapat, musyawarah, dan sosialisasi antar para pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah daerah kabupaten pasaman barat, kelompok sadar wisata, masyarakat sekitar Pantai Sasak Pohon Seribu Pasaman Barat.

Dimana komponen ini terdapat kondisi yang mana pemerintah untuk memenuhi tujuan publik melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu. Hal yang menyatakan bahwa kolaborasi adalah kondisi ketika pemerintah dan swasta berupaya mencapai suatu tujuan bersama untuk masyarakat. Ada banyak bukti empiris untuk mendukung argumen bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan ekosistem juga memberikan dampak positif pada keanekaragaman hayati.

Pokdarwis setempat telah menambahkan ornamen serta berbagai jenis hiasan menarik yang bisa dijadikan untuk berfoto dengan latar lautan pantai ssak pohon seribu Pasaman Barat. Dari garfik di atas bisa kita lihat bahwasanya wisatawan yang berkunjung ke pantai sasak pohon seribu mengalami penurunan dari tahun 2022 sampai 2023 yang jumlahnya 203.409 dan pada tahun 2023 berjumlah

124.358 dikarenakan dari tahun ke tahun pengelolaan pantai sasak pohon seribu tidak berjalan sesuai aturan tentang, Pokdarwis sudah diberikan tugas kelompok sadar wisata yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata yaitu dengan tiga seksi tetapi yang tidak berjalan adalah poin no.3 yaitu: Seksi daya tarik wisata dan kenangan yang dikepalai oleh Jhonis Muis.

Gambar 1.2 Warung Pelaku Usaha



Sumber: Dokumentasi oleh Peneliti (2023)

Kurangnya hubungan masyarakat dengan pemerintah yang mengakibatkan pengelolaan menjadi terhambat, seperti dalam pembangunan jalan masih belum bisa dikatakan baik, karena masih berupa kerikil dan berlubang yang apabila terjadi hujan akan menyebabkan air tergenang, padahal Pantai Pohon Seribu di sektor pariwisata yang mendapatkan keuntungan dan penerimaan devisa. Pantai Sasak Pohon Seribu belum dikelola secara optimal sehingga diperlukan suatu pengelolaan daya tarik untuk rekreasi wisatawan.

Lalu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke destinasi wisata pantai sasak pohon seribu masih kosong mulai dari tahun 2021-2023 dikarenakan kurangnya kerja sama pihak dinas pariwisata dan pokdarwis serta masyarakat

setempat untuk mempromosikan pantai sasak pohon seribu. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman masyarakat dalam pengelolaan daya tarik wisata, padahal sudah diberikan aturan-aturan dari kelompok sadar wisata (Pokdarwis), namun tidak berjalan dengan baik, karena masih banyak warung-warung pelaku usaha belum tersusun rapi, dan masih banyak yang membangun kedai di bawah pohon seribu, yang mengakibatkan menghalangi keindahan pohon seribu, dan akan memberikan dampak bagi daya tarik wisata.

Dengan melihat jumlah kunjungan wisatawan destinasi pariwisata pohon seribu yang masih rendah atau menurun maka dari itu pemerintah melakukan kerja sama dengan pihak dinas pariwisata dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta masyarakat setempat untuk meningkatkan pengelolaan pariwisata pantai sasak pohon seribu, dimana Permasalahan yang masih muncul dalam program pengelolaan Pantai Sasak Pohon Seribu ialah mengenai manajemen pengelolaannya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Perencanaan sendiri memiliki beberapa masalah dimana pada saat rapat koordinasi terjadi adanya gesekan antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Pihak masyarakat bersikukuh tetap ingin dilibatkan dalam pengelolaan Pantai Sasak Pohon Seribu dikarenakan pihak masyarakat merupakan perintis awal dalam mengelola Pantai Sasak Pohon Seribu.

Komitmen dalam proses kolaborasi merupakan hal yang penting untuk ditekankan, karena komitmen bukanlah kesepakatan satu kali akan tetapi suatu proses kegiatan bekerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan antara Pemerintah dengan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), Masyarakat dengan

menyusun rencana pembangunan, perbaikan, infrastruktur jalan, serta pembangunan fasilitas pendukung, hal ini sesuai dengan instruksi kepala pokdarwis serta masyarakat dalam rapat dalam meningkatkan pengelolaan pantai sasak pohon seribu pasaman barat pada 6 mei 2023. Tetapi sampai saat ini tidak adanya tindakan lanjut dari program yang sudah direncanakan , artinya komitmen yang dilakukan hanya terjadi di awal saja belum ada aksi nyata sampai saat ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan Siam selaku kepala pokdarwis pada mei 2023. Satu hal yang paling jelas dan sering dikeluhkan warga adalah akses jalan sepanjang sekitar 12-18 kilometer menuju lokasi yang kondisinya rusak parah.

Keberhasilan pengelolaan pantai sasak pohon seribu tidak mungkin tanpa keterlibatan aktor non-pemerintah yang perlu melibatkan masyarakat sipil dan masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas menjadi pertimbangan atau alasan penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai “*colaborative governance* dalam pengelolaan wisata pantai sasak pohon seribu di Kabupaten Pasaman Barat dalam penulisan proposal ini penulis mencoba menggali informasi mengenai kolaborasi yang dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat, khususnya masyarakat yang berada disekitar lokasi pariwisata yang salah satunya yang banyak diminati para pengunjung yaitu pantai sasak pohon seribu dikarenakan memiliki keunikan tersendiri yang dinamakan pohon seribu.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan destinasi

pariwisata Pantai Sasak Pohon Seribu Kabupaten Pasaman Barat tidak berjalan dengan baik.

2. Bagaimana Dampak Dan Adaptasi Pada Proses Kolaborasi Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Sasak Pohon Seribu.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas secara umum penelitian ini berfokus pada:

1. Proses *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Inovasi Destinasi Pariwisata Pantai Sasak Pohon Seribu Kabupaten Pasaman Barat, Kerjasama antar aktor, perencanaan Wisata Pantai Sasak Pohon Seribu, komitmen dan konsistensi pada program *collaborative governance* oleh para stakeholder
2. Dampak Dan Adaptasi Pada Proses Kolaborasi Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Sasak Pohon Seribu Kabupaten Pasaman Barat, Meliputi Dampak Negatif Dan Positif.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses *collaborative governance* dilihat dari komponen-komponen kolaborasi.
2. Untuk mengetahui Dampak Dan Adaptasi pada proses kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata pantai sasak pohon seribu.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Dibidang ilmu manajemen Pemerintahan , dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan pariwisata.
- b. Menambah wawasan mengenai studi *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata.

2. Secara praktis

- a. Pemerintah, penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam memeberikan kesadaran warga tentang pengelolaan pariwisata yang baik.
- b. Masyarakat, diharapkan dapat memeberikan gambaran tentang pengelolaan pariwisata dan hasil-hasilnya yang telah dicapai, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas kebijakan pemerintah.